



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RESTU KRISTIANTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 928153

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **443.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 429 m2/429 m2 di KAB / KOTA BARITO TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
2. Tanah Seluas 587 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BARITO TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **127.600.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT/ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
4. MOTOR, HONDA H1B02N41L1 A/T / SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.300.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **9.800.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	583.000.000
III. HUTANG	Rp.	189.188.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	393.811.200

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.